

Peranan Multistakeholder dalam Mewujudkan Desa Cerdas Di Desa Harapan Kabupaten Bengkulu Tengah

Desita Rahayu¹, Nour Farozi Agus², Septi Rindawati³, Askani⁴

^{1, 2, 3, 4}) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Email: ¹)desitanashattar@gmail.com, ²)nourfarozi@gmail.com,
³)nabilahmaharani940@gmail.com, ⁴)askanistia1@gmail.com

Abstract

The Covid 19 pandemic has accelerated the process of digital transformation in Indonesia. One of digital transformations action program is Smart Village. Not all villages in Indonesia are included in the smart village program. One of the villages with an adequate Village Development Index (IPD) is Harapan village, Central Bengkulu Regency. Smart village development requires the implementation of multi-stakeholder roles, that's why this service is being carried out. This service will be held on July 1 to August 1 2023. The method used is FGD and counseling with two-way discussions. Before conducting counseling, an FGD was carried out with each element determining its position on the FAM tool circle, to determine awareness of the role of each element. The output of this service is knowledge and awareness of the role of multiactors in building the 6 (six) pillars of smart villages which will ultimately produce independent villages with prosperous communities.

Keywords: *Smart Village, Multistakeholder's Role*

Abstrak

Pandemi covid 19 telah mempercepat proses transformasi digital di Indonesia. Transformasi digital ini salah satunya diwujudkan melalui Program Desa Cerdas. Tidak semua desa di Indonesia masuk ke dalam program desa cerdas. Salah satu desa dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) cukup adalah desa Harapan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pembangunan desa cerdas membutuhkan pelaksanaan peran multistakeholder, oleh sebab itu pengabdian ini dilakukan. Pengabdian ini dilaksanakan pada 1 Juli sampai dengan 1 Agustus 2023. Metode yang digunakan adalah FGD dan Penyuluhan dengan diskusi dua arah. Sebelum melakukan penyuluhan FGD dilakukan dengan tiap unsur menentukan posisinya pada lingkaran tool of FAM, untuk mengetahui kesadaran peran setiap unsur. Output dari pengabdian ini adalah adanya pengetahuan dan kesadaran peran multiaktor dalam membangun 6 (enam) pilar desa cerdas yang pada akhirnya akan menghasilkan desa mandiri dengan masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci: *Desa Cerdas, Peran Multistakeholder*

Pendahuluan

Digitalisasi selama pandemi Covid 19 telah membawa berbagai konsekuensi logis (Wahyunengseh et al., 2020) khususnya dalam tata kelola

pemerintahan. Teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam orientasi pembangunan berkelanjutan (Kasinathan et al., 2022), (Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2019). Paradigma jaringan dalam pembangunan desa mengalami perubahan (Vercher et al., 2022) (Murdoch, 2000) juga karena digitalisasi (Bosworth et al., 2023). Pemerintah pun telah mencanangkan Peta Jalan Indonesia Digital 2024, dan program nyatanya adalah Desa Cerdas yang terdiri dari 6 pilar, yaitu masyarakat cerdas, pemerintah cerdas, ekonomi cerdas, lingkungan cerdas, kehidupan cerdas, dan mobilitas cerdas. Semua pilar tersebut dapat terlaksana bila ada literasi digital (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2021). Namun, sayangnya program ini diterapkan secara berbeda-beda di Indonesia sehingga menimbulkan inkonsistensi capaian (Herdiana, 2019). Perbedaan tersebut disebabkan potensi dan kemampuan setiap desa berbeda-beda (Andari & Ella, 2019) termasuk perbedaan kelompok suku dan kesenjangan infrastruktur (Kapoor et al., 2021), sehingga pembangunan desa cerdas bukanlah *one size fit all* tapi membutuhkan strategi khusus yang sesuai dengan kemampuan dan keunggulan kompetitif masing-masing desa (Andari & Ella, 2019).

Implementasi program desa cerdas di pulau Jawa tidak bisa sepenuhnya disamakan metodenya dengan desa yang ada di luar pulau Jawa yang memiliki keunggulan kompetitif berbeda-beda dan kultur masyarakat yang beragam. Namun, demikian ada satu pola pelaksanaannya yang dapat dijadikan acuan, dimana program ini terdiri dari 6 (enam) pilar yang semuanya harus dibangun dengan pondasi yang baik yaitu tidak hanya teknologi tapi kerja sama multistakeholder. Koneksi internet yang stabil merupakan modal awal dalam pelaksanaan desa cerdas.

Permasalahan

Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK dibutuhkan dalam program desa cerdas, namun faktanya masih ada desa yang baru memiliki fasilitas internet stabil, seperti Desa Harapan Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahkan desa ini baru

mempunyai website desa – keterangan Duta digital – Lapendi, awal Januari 2023. Perangkat digital memang telah tersedia tapi aktivitas pelayanan publik masih tatap muka. Padahal komponen cerdas tata kelola pemerintahan harus memiliki literasi yang cukup terkait fungsi dan perannya selaku pelayan publik, karena pemerintah cerdas harus mampu menterjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam kebijakan-kebijakan (Redjo, 2019). Pemerintah yang tidak mampu mewujudkan cerdas tata kelola merupakan pemerintah yang mengalami krisis *governance* kronis yaitu ketidakmampuan organisasi yang meluas untuk mengatasi harapan masyarakat (Christensen, 2019). Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dan terwujudnya 6 (enam) pilar desa cerdas, dibutuhkan advokasi dari multistakeholder yang menjalankan masing-masing perannya.

Advokasi Kebijakan (Young and Quinn ; 2012) memiliki arti penting yaitu sebagai ; 1) tindakan mengubah atau mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi pengambil keputusan; 2), pelibatan dalam proses komunikasi dan meningkatkan pengaruh kebijakan; 3) menciptakan momentum dukungan, serta proses mengorganisir sumber daya yang dilakukan masyarakat dan organisasi-organisasi. Advokasi dalam persepektif program *smart village* berarti upaya mendapatkan dukungan dan meningkatkan komitmen antara multistakeholder dalam menciptakan *ouput*desa cerdas sesuai Peta Jalan Digital 2024.

Fasilitas internet yang merupakan modal utama desa cerdas seharusnya menjadi upaya mempermudah aktivitas pemerintahan dengan inovasi pelayanan online (Rahayu & Agus, 2022), dan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui penggunaan internet cerdas. Salah satu stakeholder yang menjembatani pemanfaatan internet untuk desa cerdas adalah duta digital, ada pula kader digital. Namun, pembangunan desa cerdas tidak hanya bergantung pada duta digital saja ataupun pemerintah saja tapi semua pihak. Kesadaran inilah yang harus dibangun salah satunya melalui aktivitas pengabdian ini.

Advokasi program *smart village* bukanlah hal yang mudah, karena perubahan digital dalam tatakelola desa tidak akan berhasil tanpa adanya

komitmen dan dukungan mitra. Kesadaran akan pentingnya peranan multistakeholder juga diungkapkan oleh Askani, et.al.(2023) pada tulisan mereka terkait strategi pengembangan desa. Tanpa adanya advokasi yang cukup akan dapat menyebabkan rendahnya komitmen(Alexsander et al., 2022) dan dukungan terhadap kebijakan memiliki pola permasalahan berupa; disintegrasi keterlibatan birokrasi, melemahnya komunitas kebijakan, dan penurunan atensi media (Cook dan Skogan,1991). Hal ini pulalah yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian dengan tema Peranan Multistakeholder dalam Mewujudkan Desa Cerdas di desa Harapan Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan, agar koalisi antar lembaga / organisasi yang terlibat dapat diarahkan dalam menghasilkan output desa cerdas yang tidak hanya dapat memanfaatkan teknologi untuk keterbukaan informasi tapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menjadi desa yang mandiri dengan keunggulan khas yang dimiliki. Program yang dijalankan di desa pada akhirnya merupakan upaya meningkatkan daya saing dan kesejahteraan desa (Sutikno et al., 2020).

Metode Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan lanjutan dari aktivitas pengabdian yang sebelumnya telah dilaksanakan Rahayu, dkk(2023)dengan tema '**Optimalisasi Cerdas Tata Kelola Pariwisata Berelanjutan Desa Harapan**'. Lokasi pengabdian kali ini tetap di desa Harapan Kabupaten Bengkulu Tengah. Aktivitas pengabdian ini dilakukan pada selama kurang lebih satu bulan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan yaitu pada tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023.

2. Kelompok Sasaran

Sasaran utama dari aktivitas pengabdian ini adalah multistakeholder program *smart village* mulai dari perangkat desa, masyarakat, pelaku bisnis lokal, duta digital dan kadernya, serta organisasi masyarakat dan stakeholder lain yang ada.

3. Target dan Harapan

Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait pentingnya peran masing-masing stakeholder dan atau multistakeholder dalam mewujudkan desa cerdas di desa Harapan Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dengan metode Focused Group Discussion (FGD) dan ceramah dengan diskusi dua arah. FGD dimulai dengan diskusi kelompok masing-masing unsur dengan menentukan peran masing-masing pada toof FAM, kemudian akademisi memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya peranan multistakeholder dalam program *smart village* melalui ceramah, selanjutnya multistakeholder yang ada mengajukan pertanyaan dan saling berbagi informasi dan pencerahan serta melakukan klarifikasi terkait upaya yang dapat dilakukan dalam mengadvokasi program.

5. Materi yang disampaikan

a. Stakeholder Kebijakan

Charles O. Jones menyebutkan bahwa sedikitnya ada 4 (empat) stakeholder yang terlibat dalam proses kebijakan, yakni: golongan rasionalitas, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. Peran yang dimainkan oleh keempat golongan stakeholder tersebut dalam proses kebijakan, nilai-nilai, dan tujuan yang mereka kejar serta gaya kerja mereka berbeda satu sama lain. Uraian berikut akan menguraikan bagaimana perilaku masing-masing golongan actor tersebut dalam proses kebijakan :

b. Golongan Rasionalis

Ciri-ciri utama dari kebanyakan golongan stakeholder rasionalis ialah bahwa dalam melakukan pilihan alternative kebijakan mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah berikut:

- (1) Mengidentifikasi masalah
- (2) Merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu

- (3) Mengidentifikasi semua alternative kebijakan
- (4) Meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap alternatif
- (5) Membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan
- (6) Memilih alternative terbaik.

Berdasarkan pada ciri-ciri tersebut, maka perilaku golongan aktor rasionalis ini identik dengan peran oleh para perencana dan analis kebijakan.

1) Golongan Teknisi

Seorang teknisi pada dasarnya tidak lebih dari rasionalis, sebab ia adalah seorang yang karena bidang keahliannya atau spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijakan. Golongan teknisi dalam melaksanakan tugasnya boleh jadi memiliki kebebasan, namun kebebasan ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya. Biasanya mereka bekerja di proyek-proyek yang membutuhkan keahliannya, namun apa yang harus mereka kerjakan biasanya ditetapkan oleh pihak lain. Peran yang mereka mainkan dalam hubungan ini ialah sebagai seorang spesialis atau ahli yang dibutuhkan tenaganya untuk menangani tugas-tugas tertentu.

2) Golongan Inkrementalis

Golongan actor inkrementalis ini dapat kita identikkan dengan para politisi. Para politisi, sebagaimana kita ketahui, cenderung memiliki sikap kritis namun acap kali tidak sabar terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi, walaupun mereka sebenarnya amat tergantung pada apa yang dikerjakan oleh para perencana dan para teknisi. Golongan inkrementalis pada umumnya meragukan bahwa sifat yang komprehensif dan serba rasional itu merupakan sesuatu yang mungkin dalam dunia yang amat penuh dengan ketidak sempurnaan ini. Golongan inkrementalis memandang tahap-tahap perkembangan kebijaksanaan dan implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus menerus terhadap hasil akhir (yang berjangka dekat maupun yang berjangka panjang) dari suatu tindakan. Bagi golongan inkrementalis, informasi dan pengetahuan yang kita miliki tidak akan pernah mencukupi untuk menghasilkan suatu program kebijakan yang lengkap. Oleh sebab itu pada umumnya mereka sudah cukup puas dengan

melakukan perubahan-perubahan kecil. Nilai-nilai yang terkait dengan metode pendekatan ini ialah hal-hal yang berhubungan dengan masa lampau atau hal-hal yang berhubungan dengan terpeliharanya status quo, kestabilan dari system dan terpeliharanya status quo.

3) Golongan Reformis

Seperti halnya golongan inkrementalis, golongan actor reformis pada dasarnya juga mengakui akan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses kebijakan, sekalipun berbeda dalam cara menarik kesimpulan. Golongan inkrementalis berpendirian bahwa keterbatasan informasi dan pengetahuan itulah yang mendikte gerak dan langkah dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam kaitan ini Bray brooke dan Lindblom mengatakan, bahwa hanyalah kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikenal, dan yang akibat-akibatnya menimbulkan perubahan kecil pada apa yang sudah ada yang akan dipertimbangkan. Pendekatan seperti ini bagi golongan reformis (yang notabene menghendaki perubahan sosial), dianggap terlampau konservatif.

Golongan reformis ini sependapat dengan pandangan David Easton yang menyebutkan bahwa kita harus menerima sebagai kebenaran akan perlunya mengarahkan diri kita langsung pada persoalan-persoalan yang berlangsung hari ini untuk memperoleh jawaban singkat dan cepat dengan memanfaatkan perangkat analisis serta teori-teori mutakhir yang tersedia, betapapun tidak memadainya perangkat analisis dan teori-teori tersebut. Dengan demikian, tekanan perhatiannya adalah pada tindakan sekarang, karena urgensi dari persoalan yang dihadapi.

c. Peranan Multistakeholder dalam Kebijakan

Perubahan paridgma ilmu administrasi negara menjadi administrasi publik kemudian beralih ke manajemen publik turut pula mendorong perkembangan kajian bahkan teori tentang stakeholder kebijakan yang saat ini diakui tidak hanya terkait pada satu atau dua aktor saja tapi multistakeholder. Teori multistakeholdersaat ini banyak digunakan dalam proses kebijakan publik yang

semakin dinamis. Bryson, et al dalam Rahayu (2020) mengatakan bahwa multistakeholder dapat dianggap sebagai aset, yang menyumbangkan pengetahuan, pandangan, dan dukungan. Salah satu ahli yang berperan mengembangkan teori ini adalah Freeman pada tahun 1984 dalam Sherkat(2016) yang mengatakan bahwa aktor dalam organisasi bisa berupa kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi. Harrison & Thompson(2015) juga menguraikan definisi aktor/ stakeholder sebagai kelompok atau individu yang membantu sebuah organisasi menciptakan nilai, menerima nilai dari organisasi, atau sebaliknya.

Kivits (2013) menyatakan bahwa salah satu paradigma teori aktor atau yang ia sebut stakeholder adalah keterlibatan yang ia ringkas dan bahas ke dalam 3 (tiga) komponen atau landasan dalam mengidentifikasinya, yaitu :

1. *The frame of reference* yaitu perbedaan aktor berdasarkan perbedaan kepentingan. Ada 3 (tiga) kelompok yaitu mendukung, tidak mendukung, dan pesaing.
2. Jaringan yaitu identifikasi berdasarkan hubungan dan outcome yang diinginkan.
3. Stakeholder *salience* (arti penting aktor) yaitu identifikasi berdasarkan legitimasi yaitu kekuatan (*power*) dan urgensi. Kivits juga mengutip tulisan Lukes tentang 3 (tiga) dimensi kekuatan yaitu :
 - a. dapat diamati
 - b. Aturan, bentuk, media, dan metode
 - c. Struktur sosial yang lebih dalam.

Kekuatan bila dalam ilmu sosiologi diidentifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kekuatan termasuk pula otoritas, pengaruh, kemampuan memaksa, memperkuat, memanipulasi, dan sebagainya. Sedangkan urgensi merupakan upaya identifikasi berdasarkan derajat kepentingan seperti yang dilakukan oleh Jones (1991).

Ada pula aktor yang dikaitkan dengan teori jaringan seperti yang dikemukakan oleh Rowley(1997, hal. 887) ia mengatakan teori jaringan muncul

seiring dengan keterlibatan pihak-pihak yang diakui sebagai aktor seperti yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak pelayanan publik. Adanya kepentingan tertentu yang dimiliki aktor yang berbeda telah pula memunculkan teori efektivitas jaringan antar organisasi seperti yang diungkapkan Provan dan Milward dalam Sherkat (2016). Teori inilah dapat digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang tanpa disadari turut berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Pengaruh aktor dalam organisasi atau kegiatan dan program dapat dilakukan juga dengan Alternatif alat atau *toolbox* lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fast Arrangement Mapping* (FAM) untuk mendapatkan informasi yang baik dan cepat tentang siapa saja para stakeholder aktif. Brouwer, Kormelinck, dan van Vugt (2012, 13) menyebutkan bahwa alat ini pertama kali dikembangkan di Bolivia dan dalam penggunaannya dibutuhkan minimal dua orang narasumber yang akan berdiskusi menjawab pertanyaan tentang siapa saja multi aktor. Ada dua hal penting dalam menggunakan alat ini yaitu 1) Penempatan aktor berdasarkan pengaruhnya : aktor paling berpengaruh diletakkan di lingkaran pertama (dari 3 lingkaran atau *cluster*) yang dekat dengan pusat/ inti. *Cluster* kedua diisi oleh aktor yang kurang berpengaruh sementara di lingkaran terakhir adalah aktor *periphery* dalam pengambilan keputusan; 2) Para aktor bisa dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki yang sesuai. Teori FAM inilah yang akan digunakan untuk melihat seberapa besar setiap unsur menyadari peranannya.

Hasil Dan Pembahasan

Tahapan realisasi pengabdian kepada masyarakat di desa Harapan Kabupaten Bengkulu ini dimulai dari :

- a. 1 Juli 2023 sampai dengan 7 Juli 2023 : persiapan materi presentasi yang dilakukan dengan diskusi, berikut ini salah satu dokumentasinya.

Gambar 1. Diskusi bersama persiapan materi pengabdian.

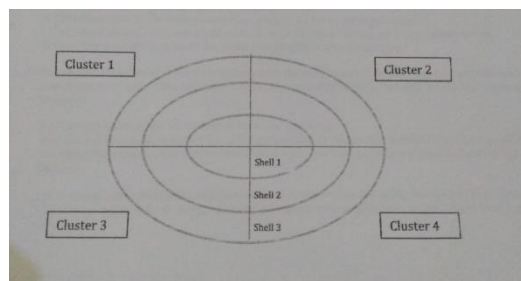


Sumber : dokumentasi, Juli 2023

- b. 8 Juli 2023 : pemantapan materi dan presenter kegiatan.
- c. 12 Juli 2023 : realisasi kegiatan di balai desa Harapan yang dihadiri pemerintah setempat (perwakilan kecamatan), pengusaha lokal (pengusaha perkebunan salak, manisan salak, pedagang area pantai), organisasi pemuda (IRMA, Karang Taruna), pemerintah desa (perangkat desa dan BPD).
- d. 20 Juli 2023 : diskusi kedua di balai desa Harapan

Pelaksanaan pengabdian ini tidak diawali dengan pembentukan kelompok masing-masing unsur terdiri dari dua atau 3 orang yang kemudian melakukan pemetaan peran masing-masing melalui Focused Group Discussion (FGD), berikut isian sederhana yang harus dikerjakan oleh masing-masing grup :

Gambar 2. Fast Arrangement Mapping (FAM)



Sumber : Brouwer, Kormelinck, van Vugt (2012)

Setiap grup diskusi hanya menentukan posisi perannya masing-masing, apakah dilingkaran 1, 2, atau 3, semakin dekat ke titik artinya perannya semakin

besar. Penentuan titik ini untuk melihat seberapa penting setiap unsur menyadari peran dan posisinya. *Tool* FAM ini memiliki tingkat kesulitan yang menengah, namun dapat dikerjakan hanya dengan dua orang narasumber yang tepat.

Hasil Tool of FAM FGD

Tabel 1. *Tool* FAM Multistakeholder Program Desa Cerdas Desa Harapan

Kelompok Aktor: Organisasi/ Kelompok/ Individual	Posisi Stakeholder								
	Paling Berperan dalam Pengambilan Keputusan Desa Cerdas			Tidak Terlalu Berpengaruh dalam Pengambilan Keputusan Desa Cerdas			Periphery dalam Pengambilan Keputusan Desa Cerdas		
Kelompok 1					v				
Kelompok 2				v					
Kelompok 3						v			
Kelompok 4					v				
Kelompok 5					v				
Kelompok 6							v		

Sumber : hasil Olahan, Agustus 2023

Tabel 1. Merupakan Hasil FGD hanya menyebutkan kelompok tanpa disebutkan unsur apa yang ada dalam kelompok tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan di kemudian hari namun hasil tersebut memperlihatkan bahwa hasil diskusi masing-masing kelompok tidak menganggap posisinya berada pada kelompok yang paling berpengaruh. Padahal setiap unsur memiliki posisi dan perang yang berpengaruh pada bidang-bidang tertentu. Apalagi ada 6 (enam) pilar yang akan dibangun dalam desa cerdas.

Berikut dokumentasi kegiatan FGD :

Gambar 3. FGD di desa Harapan



Sumber : Dokumentasi, Juli 2023.

Gambar 4. Diskusi Dua Arah Tindak Lanjut FGD



Sumber : dokumentasi, Juli 2023

e. 1 Agustus 2023 : Pembuatan laporan Pengabdian

Program Desa Cerdas merupakan program aksi yang berkaitan dengan Peta Jalan Digital 2024, dengan harapan tidak ada lagi desa yang terisolasi dan tak berdaya melainkan desa yang mandiri. Desa yang mandiri memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) 75 dari skala 1-100. Namun, demikian pada pelaksanaannya belum semua desa masuk atau ikut program ini. Beberapa desa di Kabupaten Bengkulu Tengah ada yang belum masuk program, sehingga merupakan kesempatan baik bagi desa yang telah ikut serta. Partisipasi aktif multistakeholder dibutuhkan mulai dari pelaku usaha lokal, nasional (bila ada),

perangkat desa, warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah kabupaten, dan unsur lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan program.

Berdasarkan FGD yang dilakukan rata-rata setiap unsur hanya menempatkan diri mereka pada kluster kedua dan ketiga, artinya mereka menganggap posisi atau perannya tidak terlalu penting. Padahal desa cerdas berarti desa mandiri, dimana setiap unsur memiliki peranannya masing-masing dan peran aktif yang bermanfaat dalam merealisasikan desa cerdas. Setelah dilakukan FGD dan diketahui hasilnya, aktifitas selanjutnya adalah pemberian materi ceramah dan diskusi terkait upaya mewujudkan desa cerdas, dan berbagai golongan aktor yang ada dan dibutuhkan.

Tindak lanjut dari aktifitas FGD adalah ceramah dan diskusi dua arah terkait peran masing-masing golongan aktor dan 6 pilar desa cerdas yaitu :

1. Masyarakat cerdas yang berkaitan dengan program yang menjadi tempat dan sumber pengetahuan maupun informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Mobilitas cerdas yang berkaitan dengan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan dengan teknologi tinggi, dimana ada sistem transportasi dengan teknologi tinggi baik teknologi elektrik, komputer, dan telekomunikasi yang memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, biaya, tenaga yang ramah lingkungan.
3. Cerdas tatakelola pemerintahan merupakan program dimana pemerintah desa memanfaatkan teknologi informasi dengan *e-governance* untuk mempermudah pelayanan publik dan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
4. Cerdas ekonomi yaitu berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produktif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraannya.
5. Hidup Cerdas yaitu berkaitan dengan upaya menginisiasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat, asri, bersih, asli dan rapi dalam rangka menjaga lingkungan desa yang berkelanjutan.

6. Lingkungan cerdas seperti aktivitas pengabdian yang dilakukan Rahayu, dkk (2023) berkaitan dengan pengelolaan lingkungan pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup sama seperti memperhatikan pembangunan infrastruktur fisik bagi warga. Jadi ada pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorong.

Aktifitas diskusi pada sesi dua berlangsung dua arah dengan sesi tanya jawab saling berbagi pengetahuan dan membuka wawasan terkait peran masing-masing stakeholder. Multistakeholder harus menyadari peran dan menjalankannya agar terbangun 6 pilar desa cerdas yang akhirnya menjadi desa mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan warganya dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana.

Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat di desa Harapan Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan dengan baik dengan output terbukanya wawasan bahwa multistakeholder dibutuhkan dalam membangun desa cerdas. Multistakeholder harus menyadari pentingnya peran dan menjalankannya dengan baik, sehingga terwujud 6 pilar desa cerdas dan Peta Jalan Digital 2024 terwujud.

Daftar Pustaka

- Alexsander, Harmiati, Triyanto, D., & Rahayu, D. 2022. *Monograf Advokasi Kebijakan Berbasis Permodelan System Dynamic* (1st ed.). Nas Media Indonesia.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XPFZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=%27Monograf+Advokasi+Kebijakan+Berbasis+Permodelan+System+Dynamic%27&ots=0obdnd_z7k&sig=PsOo1wMWTB1kMNYkv-X-o8ZCDpA&redir_esc=y#v=onepage&q='Monograf Advokasi Kebijakan Berbasis
- Andari, R. N., & Ella, S. 2019. Pengembangan Model Smart Rural untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 41-58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.394>

- Askani, A., Putri, S., Salehan S., Rahayu, D. 2023. Perumusan Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah). *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu*, 2(1), 17-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.56135/jsb.v9i1.75>
- Bosworth, G., Whalley, J., Fuzi, A., Merrell, I., Chapman, P., & Russell, E. 2023. Rural co-working: New network spaces and new opportunities for a smart countryside. *Journal of Rural Studies*, 97(January), 550-559. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.01.003>
- Christensen, T. 2019. Organization Theory and Public Administration. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Clack Baxter. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1439>
- Dwi Wahyunengseh, R., Hastjarjo, S., Mulyaningsih, T., & G. Suharto, D. 2020. Digital Governance and Digital Divide: A Matrix of the Poor's Vulnerabilities. *Policy & Governance Review*, 4(2), 152. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i2.296>
- Herdiana, D. 2019. Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Kapoor, N., Ahmad, N., Nayak, S. K., Singh, S. P., Ilavarasan, P. V., & Ramamoorthy, P. 2021. Identifying infrastructural gap areas for smart and sustainable tribal village development: A data science approach from India. *International Journal of Information Management Data Insights*, 1(2), 100041. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2021.100041>
- Kasinathan, P., Pugazhendhi, R., Elavarasan, R. M., Ramachandramurthy, V. K., Ramanathan, V., Subramanian, S., Kumar, S., Nandhagopal, K., Raghavan, R. R. V., Rangasamy, S., Devendiran, R., & Alsharif, M. H. 2022. Realization of Sustainable Development Goals with Disruptive Technologies by Integrating Industry 5.0, Society 5.0, Smart Cities and Villages. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22). <https://doi.org/10.3390/su142215258>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. 2021. *modul pilar desa cerdas* (O. W. Purbo (ed.)).
- Murdoch, J. 2000. Networks - A new paradigm of rural development? *Journal of Rural Studies*, 16(4), 407-419. [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(00\)00022-X](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(00)00022-X)
- Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. 2019. Laporan Isu Strategis Pengembangan Model Cerdas. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.

- Rahayu, D. 2020. *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kota Bengkulu (Analisis Keterlibatan Multistakeholder)*.
- Rahayu, D., & Agus, N. F. 2022. Inovasi Pekan Sagu Dan Moment Of Truth Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Di Era Vuca Oleh. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 240–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v11i2.3375>
- Rahayu, D., Reski, H., Ridianto, Charolina, O., & Alfatah, D. 2023. Penanaman Bibit Pohon Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Lingkungan Di Twa (Taman Wisata Alam). *Jurnal Semarak Mengabdi*, 2(1), 27–32. <https://jurnal.stiabengkulu.ac.id/index.php/jsm/article/view/87>
- Rahayu, D., Supawanhar, & Akmal, S. 2023. Optimalisasi cerdas tata kelola pariwisata berkelanjutan desa harapan. *Semarak Mengabdi*, 2(2), 45–52. <http://159.223.71.124/index.php/jsm/article/view/101/126>
- Redjo, S. I. 2019. Pemerintahan Yang Cerdas Yang Dibutuhkan Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, IX(1), 1–7. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/2291>
- Sutikno, B., Marjoyo, & Rahayu, D. 2020. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Daya Saing Desa (Peran Badan Usaha Milik Desa Taba Jambu Jaya Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah). *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 1–18. <https://www.journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1238/715>
- Vercher, N., Bosworth, G., & Esparcia, J. 2022. Developing a framework for radical and incremental social innovation in rural areas. *Journal of Rural Studies*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.01.007>